

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI **NUSA TENGGARA BARAT**

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A2 SUMBAWA **BESAR**

JI. Garuda Nomor 107, Sumbawa Besar 84351; TELEPON (0371) 21224; FAKSIMILE (0371) 21720; SUREL kppn999146@kemenkeu.go.id; LAMAN www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sumbawabesar

Nomor

: S-429/KPN.2304/2023

2 Oktober 2023

Sifat

: Biasa

Hal

: Implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) Tersertifikasi Tahap III pada

Sistem SAKTI

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Satker Mitra Kerja KPPN Sumbawa Besar

Sehubungan dengan implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) Tersertifikasi Tahap III pada Sistem SAKTI dalam rangka digitalisasi pengeluaran negara serta menindaklanjuti nota dinas Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Nomor ND-1349/PB.8/2023 tanggal 30 September 2023 hal Implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) Tersertifikasi Tahap III pada Sistem SAKTI dan Nomor 1360/PB.8/2023 tanggal 2 Oktober hal Penangguhan Implementasi TTE Tersertifikasi pada Sistem SAKTI, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Penggunaan TTE Tersertifikasi sesuai PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, diwajibkan dalam rangka pengesahan dokumen pembayaran atas beban APBN (SPP, SPM, dan dokumen pendukung SPM) yang diajukan oleh Satker kepada KPPN.
- 2. Implementasi TTE oleh Satker Tahap III sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-87/PB/2023 tanggal 5 Mei 2023 hal Persiapan Pelaksanaan Piloting Tahap III Penerapan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi pada Sistem SAKTI, diberlakukan pada 34 K/L yang proses pendaftaran sertifikat elektroniknya telah selesai pada 31 Agustus 2023.
- 3. Sesuai dengan nota dinas Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan nomor ND-1212/PB.8/2023 tanggal 7 September 2023 hal Pemberitahuan Rollback Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Tersertifikasi pada Aplikasi SAKTI bagi Satker K/L Piloting Tahap III, implementasi TTE Tahap III pada Sistem SAKTI dilakukan penundaan/rollback berkenaan dengan telah terjadinya gangguan layanan sertifikasi elektronik pada BSrE BSSN.
- 4. Sehubungan dengan telah dipersiapkannya sistem dan infrastruktur untuk mendukung implementasi kembali TTE Tahap III pada Sistem SAKTI, dengan ini disampaikan bahwa implementasi dimaksud akan dibagi ke dalam 2 (dua) tahap berikut:

Tahap	Jumlah K/L	Jumlah Satker	Jumlah User	Tanggal Implementasi (Cut Off Manual)
III A	24	1.414	6.443	5 Oktober 2023
III B	10	12.828	56.495	16 Oktober 2023
Jumlah	34	14.242	62.938	

Rincian K/L sebagaimana terlampir.

5. Sehubungan dengan itu, dalam rangka persiapan implementasi TTE Tahap III jika terdapat kendala dalam pelaksanaan, satker dapat melakukan konsultasi ke KPPN Sumbawa Besar.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Sumbawa Besar



Ditandatangani secara elektronik Aziz Muthohar



IMPLEMENTASI TTE TERSERTIFIKASI TAHAP III

TAHAP III A Tanggal Cut Off per 5 Oktober 2023

NO	KODE K/L	NAMA K/I		JUMLAH USER
1	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	223	917
2	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	218	893
3	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	180	854
4	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	159	778
5	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	102	532
6	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRA	95	422
7	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	72	291
8	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	43	272
9	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	52	249
10	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	62	241
11	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	41	195
12	107	BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)	45	191
13	065	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	43	179
14	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	36	160
15	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	34	157
16	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	1	27
17	119	BADAN KEAMANAN LAUT	1	23
18	083	BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL	1	16
19	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	1	11
20	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	1	9
21	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	1	8
22	126	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	1	8
23	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	1	5
24	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BE	1	5
TOTAL			1.414	6.443

TAHAP III B Tanggal Cut Off per 16 Oktober 2023

ОИ	KODE K/L	NAMA K/L	JUMLAH SATKER	JUMLAH USER
1	025	KEMENTERIAN AGAMA	5.606	23.380
2	005	MAHKAMAH AGUNG	1.853	7.484
3	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1.437	5.989
4	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	1.158	4.729
5	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	703	4.500
6	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	675	3.757
7	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	555	2.452
8	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	397	1.655
9	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	223	1.368
10	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	221	1.181
TOTAL			12.828	56,495



